



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh
NASIRMAN
11521101394

PROGRAM SI

JURUSAN HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2019

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. WAHIDIN, S. Ag. M. Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Pekanbaru, 23 Mei 2019

No. : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. NASIRMAN

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
Di-
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan bimbingan seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang berjudul "**TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM**" yang ditulis oleh Sdr. **Nasirman** telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat Sdr. **Nasirman** tersebut dapat dipanggil dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

Demikianlah harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam
Pembimbing

Dr. WAHIDIN, S. Ag. M. Ag
1971011081997031003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **NASIRMAN**
 NIM : 11521101394
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin 30 September 2019
 Waktu : 13.30 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Munir, Lc., MA

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

“Dan seandainya semua pohon yang ada di bumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta, ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah yang akan dituliskan, sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(QS. Lukman: 27)

Alhamdulillah.... dengan ridha-Mu ya Allah....

Amanah ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Cinta telah ku gapai, namun itu bukan akhir dari perjalanan ku, melainkan awal dari sebuah perjalanan.

Ibu..... Ayah.....

Tiada cinta yang paling suci selain kasih sayang ayahanda dan ibundaku

Setulus hatimu bunda, searif arahanmu ayah

Doamu hadirkan keridhaan untukku, Petuahmu tuntunkan jalanku

Pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malammu

Dan sebatit doa telah merangkul diriku, Menuju hari depan yang cerah

Kini diriku telah selesai dalam studiku

Dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah,

Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Ayahanda

Adik-adikku

Terima kasih atas cintanya, semoga karya ini dapat mengobati beban kalian

walaupun hanya sejenak, semua jasa-jasa kalian tak kan dapat kulupakan.

Semoga Allah beserta kita semua

Untuk tulusnya persahabatan yang telah terjalin, spesial buatnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat-sahabatku, ...,

Atas dan semua teman-teman

Terima kasih... Semoga persahabatan kita menjadi persaudaraan yang abadi

selamanya, Bersama kalian warna indah dalam hidupku, suka dan duka berbaur dalam kasih,

buka juga suatu kebanggaan,

Hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan...

Semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya

Amin...



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nasirman (2019): Tradisi Mappasiala Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi mengenai Tradisi *Mappasiala*, Tradisi ini adalah Tradisi dimana seorang wanita dipaksa melangsungkan perkawinan terhadap laki-laki yang di pilihkan oleh orang tua, setuju atau tidak setuju wanita tersebut pernikahan akan tetap berlangsung. Batasan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Tradisi *Mappasiala* yang terjadi pada tahun 2017-2018 saja, dengan rumusan masalah Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Mappasiala* Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Bagaimana Dampak Tradisi *Mappasiala* Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mappasiala* dalam Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi *Mappasiala*, dampak Tradisi *Mappasiala*, dan tinjauan Hukum Islam. Sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi dan wawancara, dengan subjek penelitian adalah wali dari mempelai wanita, mempelai wanita, dan pemuka masyarakat dalam Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan yang telah di sajikan dengan berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa pelaksanaan Tradisi *Mappasiala* dimulai antara pertemuan kedua ayah dari kedua mempelai mereka akan berbincang mengenai anak bujangnya dengan anak gadis nya, setelah mereka setuju lantas orang tua dari wanita akan memberi tau wanita tersebut bahwa ia akan di nikahkan setuju atau tidak setuju pernikahan tetap berlangsung kemudian orang tua dari wanita akan bertanya kepada pihak-pihak keluarga terdekatnya. Apabila semua keluarga setuju dengan *Mappasiala* tersebut maka mereka akan memberi tahu pihak dari laki-laki tersebut untuk datang ke rumah wanita.

Tradisi *Mappasiala* atau nikah paksa menurut hukum Islam yakni didalam hukum Islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Tetapi sah saja apabila yang menjadi wali pada pernikahan tersebut yakni Wali *Mujbir*, Wali *Mujbir* adalah wali yang boleh memaksa anaknya menikah dengan pilihannya. Tapi alangkah baiknya apabila orang tua meminta persetujuan terlebih dahulu kepada mempelai dan mengetahui jawaban yang sebenarnya dari mempelai wanita. Agar terhindar dari dampak-dampak yang negatif dari Tradisi *Mappasiala*.

Kata Kunci : Tradisi *Mappasiala*, Hukum Islam.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah swt. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Mappasiala Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Menurut Hukum Islam”**. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan hasil jerih payah Beliau.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

Kepada yang teristimewa untuk Ayahanda Firdaus dan Ibunda Multazam yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir.

Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Suryan A. Jamrah, MA.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selaku Wakil Rektor (satu) . Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd. selaku Wakil Rektor (dua). Bapak Drs. H. Promadi, MA., Ph.D., selaku Wakil Rektor (tiga) beserta seluruh staf dan jajarannya.

Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau., Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini.

4. Kepada Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan.

5. Kepada Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku pembimbing skripsi dan Buk Yusliati,Dra. selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis.

6. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Kepada Keluarga Besar Kerukunan Keluarga Pemuda Bugis (KKP Bone) di seluruh Indonesia yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dan do'a sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan.

Sahabat-sahabat yang yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Sahabat seperjuangan, AH. C terima kasih atas segala dukungan, bantuan, motivasi dan semangat serta kenangan yang diberikan selama perkuliahan hingga selesainya karya ilmiah ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagi pemikiran dan dorongan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian dan karya ini tepat waktu.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah swt, penulis memohon ampunan atas semua kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna, amin.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

Penulis,

NASIRMAN
NIM : 11521101394

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	15
A. Sejarah Berdirinya Desa Pulau Kijang.....	15
B. Kondisi Geografis	18
C. Jumlah Penduduk	19
D. Mata Pencarian	20
E. Pendidikan.....	22
F. Kepegawaian	22
G. Agama	25
BAB III TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN TRADSI MAPPASIALA.....	26
A. Perkawinan.....	26
1. Pengertian Perkawinan.....	26
2. Syarat Dan Ruku Perkawinan	30
3. Hukum Nikah	43
4. Hikmah Perkawinan.....	45
B. Kawin Paksa.....	47
1. Pengertian Kawin Paksa.....	47
2. Dampak Kawin Paksa	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH.....	56
A. Pelaksanaan Tradisi <i>Mappasiala</i> Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

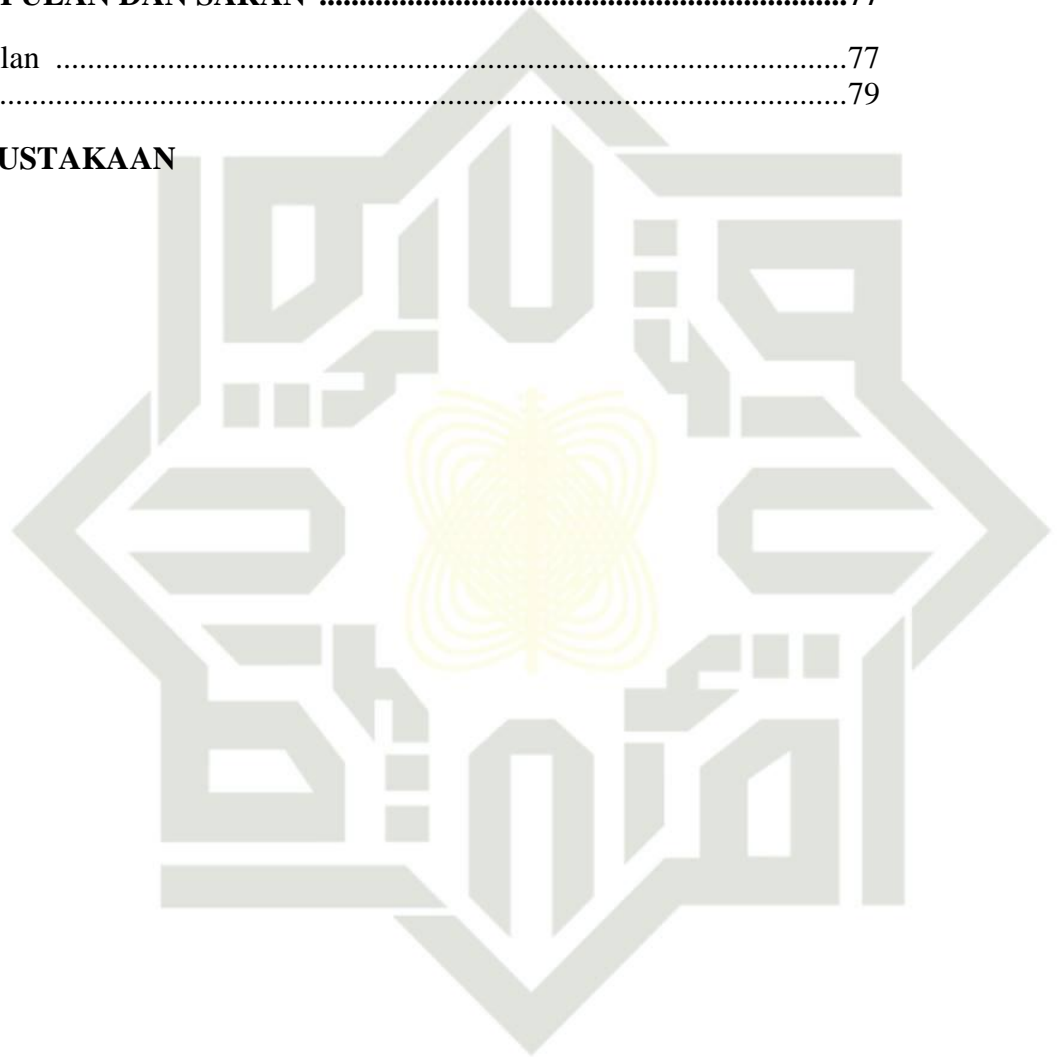
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

B.	Dampak Tradisi Mappasiala Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh	63
C.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Mappasiala</i> Dalam Suku Bugis Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran.....	79

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Di Desa Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 2	Jumlah Penduduk Di Desa Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa.....	19
Tabel 3	Perkebunan Di Desa Pulau Kijang	20
Tabel 4	Komposisi Mata Pencharia Di Desa Pulau Kijang	20
Tabel 5	Klasifikasi Penduduk Di Desa Pulau Kijang Menurut Tingkat Pendidikan	21
Tabel 6	Jumlah Pegawai Kantor Yang Berada Di Kecamatan Reteh.....	22
Table 7	Jumlah Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Berdasarkan Agama.....	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.¹ Nikah secara bahasa mempunyai arti hakiki dan majasi. Arti hakiki nikah ialah bergabung, sedangkan arti majasi nikah ialah *alwatha'* yang berarti bersetubuh.² Dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.³ Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Hukum perkawinan bagi manusia dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Wajib yaitu bagi orang yang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, namun nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan.

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), cet. ke-3 hal. 104

² Ahmad azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press, 2007), cet. ke-1, hal.124

³ R.Subekti dan R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burglijk Wetboek*, Bab I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), cet. ke-3, hal.537

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sunnah apabila orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin tetapi masih dapat menahan diri dari berbuat zina.
- c. Haram apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin.
- d. Makruh apabila seseorang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri karena dia kaya dan tidak memiliki keinginan syahwat yang kuat.
- e. Mubah apabila seorang laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan dia segera kawin atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin.⁴

Dari penjelasan di atas jelas tentang kewajiban dalam menikah, sebagaimana al-Qur'an menjelaskan surah an-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, dan kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukanmu mereka dengan Kurnia-Nya. Dan Allah maha luasa pemebriannya lagi maha mengetahui."⁵

Menurut ajaran agama Islam menikah merupakan suatu sunnah bagi ummat muslim. Saat untuk menentukan, banyak sekali pertimbangan untuk mendapatkan keputusan terbaik. Namun bagaimana jika seorang

⁴ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakhat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), cet. ke-3, hal.

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet. ke-1, hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpaksa menikah baik dari sisi kondisi internal maupun eksternal. Pada dasarnya menikah sangat disarankan oleh Rasulullah saw. Banyak sekali manfaat kenapa dianjurkan menikah salah satunya menghindari pihak pria dan wanita melakukan perzinahan dan maraknya fitnah.

Syarat perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat perkawinan tersebut ialah sebagai berikut:⁶

1. Syarat calon suami
 - a. Bukan mahram
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Jelas orangnya
 - d. Tidak sedang menjalani ihram
2. Syarat calon istri
 - a. Tidak ada halangan hukum yakni tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
 - b. Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 KHI bentuk persetujuan calon wanita, dapat berupa pernyataan, tulisan, lisan atau isyarat. Bila perkawina tidak disetujui oleh seorang calon mempelai perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 (2) KHI).
 - c. Jelas orangnya.

⁶ Azni, *Ilmu Fiqh dan Hukum Keluarga*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), cet. ke-2, hal. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak sedang berihram haji.
3. Syarat wali

Laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak sedang ihram.
4. Syarat saksi
5. Laki-laki, baligh, waras, dapat mendengar dan melihat, bebas, tidak sedang ihram, dan memahami yang dipergunakan ijab Kabul.
6. Syarat-syarat ijab qabul

Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti, ada ijab, memakai kata-kata nikah, anantara ijab dan qabul tidak boleh putus, tidak sedang ihram, majlis ijab qabul kurang lebih 4 orang.

Dalam membangun keluarga sakinah ada 10 indikator tercapainya tujuan perkawinan, adapun prinsipnya antara lain:⁷

- a. Masing masing suami dan isteri mempunyai tekad sebagai pasangan dalam berumah tangga.
- b. Ada kerelaan dan persetujuan antar suami istri
- c. Perkawinan untuk selamanya.
- d. Anggota keluarga melaksanakan norma agama.
- e. Kehidupan berkeluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi.
- f. Berusaha menciptakan rasa aman, dalam kehidupan berkeluarga.
- g. Menghindari terjadinya kekerasan.

⁷ Khoriddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode, Pemabaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Aedemia, 2009), cet. ke-2, hal. 231

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Bahwa hubungan suami istri adalah hubungan *partnership*, yang berarti saling menolong membantu menyelesaikan urusan rumah tangga.
- i. Ada keadilan.
- j. Terbangun komunikasi antara anggota keluarga.

Berdasarkan prinsip perkawinan diatas, terdapat kerelanan belah dua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Jika prinsip tersebut tidak dipatuhi tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibina akan bersifat sementara saja.

Secara hukum nikah paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 yang menyatakan bahwa, "*Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.*"⁸

Beberapa *fuqaha* berpendapat mengenai izin nikah atas gadis dan janda yang belum terdapat kerusakan dari dirinya. Imam Malik dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa darinya harus diminta persetujuan.

Imam Muslim juga meriwayatkan hadist dari Ibnu Abbas r.a. tersebut dengan tambahan, yakni Nabi saw. Bersabda:

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "*Gadis itu diminta pesetujuan oleh ayahnya*" (H.R. Muslim).⁹

⁸ R.Subekti dan R.Tjitrosudiro, *op.cit*, hal. 538.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, Analisis Fiqh Para Mujtahid*, terj, jil. 2, (Jakarta: Pustaka Aamani, 2017), cet. ke-2, hal. 401

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hadis Nabi saw. Yang berbunyi :

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَنْكِحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحِ الْبُكَرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: “Ubaidullah bin Umar bin Maisarah al-Qawariry telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin al-Harits telah memberitahukan kepada kami Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah memberitahu kepada kami, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasul, bagaimana tanda ia setuju?”. Beliau menjawab, “Bila ia diam.”¹⁰

Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir

Provinsi Riau adalah suatu daerah yang terletak di salah satu kecamatan yang berada Indragiri hilir yakni kecamatan Reteh yakni desa Pulau Kijang. Pulau Kijang adalah ibu kota Kecamatan Reteh berbatasan dengan Kecamatan Tanah Merah di sebelah Utara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Jambi) di sebelah Timur dan Selatan dan Kecamatan Keritang atau Kota Baru di sebelah Barat dengan luas daerah 1.160.597 Ha, dengan jumlah penduduk 17.000-18.000. Berada disisi aliran sungai Gangsal dengan penduduk yang bermacam suku antara lain: Melayu, Banjar, Jawa, Minang, Bugis. Dengan mata pencarian yang beraneka ragam yakni petani, nelayan dan pedagang.

¹⁰ al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-Yamani as-shana'ni, *Subulussalam Syarah Bulugul Maram*, (Beirut: Dar al-kotob al-Ilmiyah, 2006), cet. ke-1, hal. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat suku Bugis di Pulau Kijang Kecamatan Reteh memiliki suatu tradisi yang bernama *Mappasiala*. Tradisi ini adalah tradisi di mana seorang wanita di paksa melangsungkan pernikahan terhadap laki-laki yang di pilihkan oleh orang tuanya setuju atau tidak setujunya wanita tersebut pernikahan akan tetap berlangsung sesuai kesepakatan dari kedua keluarga dan juga mekanisme permintaan izin kepada wanita hanya seakan-akan memberitahu bahwa wanita akan di nikahkan oleh laki-laki yang di pilihkan orang tuanya.

Ada banyak wanita menolak hal tersebut bahkan ada yang melakukan *Silariang* atau kawin lari dengan kekasih pujaan mereka. Tapi ada juga sebagian dari wanitanya menuruti pernikahan yang telah dipilhkan oleh kedua orang tuanya tersebut.

Fakta yang terjadi di lapangan, *Mappasiala* ini sangat merugikan para wanita yang ada di Desa Pulau kijang karena mungkin dari mereka ada yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan tersebut atau mereka mungkin masih ingin melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi walaupun mereka dianggap telah dewasa.

Seperti kasus yang terajadi di desa pulau kijang yang dialami oleh Andi Rifki yang berusia 22 tahun dengan Murni yang berusia 20 tahun. Andi Rifki yang ingin menikahi Murni datang dengan keluarganya ke rumah mempelai wanita yakni Murni. Dalam pertemuan tersebut, mereka bermusyawarah dengan pihak keluarga dari calon istri atau keluarga dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Murni untuk menyampaikan kehendak dari Andi Rifki yakni menikahi Murni. Kehendak Andi ini kemudian diterima oleh keluarga Murni tanpa adanya persetujuan atau keridhoan dari Murni sebagai calon mempelai wanita. Bahkan Murni sebagai calon pengantin perempuan sama sekali tidak diberikan hak untuk menyatakan pendapatnya. Setelah mengetahui perjodohan, tersebut Murni lari keluar dari desa dan pergi ke Batam.

Namun, karena lamaran atau *Mappasiala* dari Andi Rifki tersebut telah diterima oleh keluarga dari pihak Murni serta perkawinan tersebut telah disepakati oleh kedua keluarga, Murni pun dijemput oleh keluarganya sehingga perkawinan tersebut tetap dilanjutnya sesuai kesepakatan sebelumnya.¹¹ Pada dasarnya kebiasaan yang dilakukan oleh suku Bugis yang ada di Pulau Kijang itu adalah hal yang mereka anggap baik dan ketakutan terhadap anak gadisnya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau membuat keluarga malu.

Jadi berdasarkan fakta dan teori diatas penulis tertarik mengangkat judul dengan tema: “*Tradisi Mappasiala Dalam Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Menurut Hukum Islam*”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan serta titik tolak masalah-masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang telah diteliti dan mendakati masalah yang diinginkan.

¹¹ Murni, (mempelai wanita), wawancara, Pulau Kijang tanggal 12 November 2018 pukul 09:00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu peneliti hanya meneliti Tradisi *Mappasiala* dalam Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh Menurut hukum Islam pada tahun 2017-2018. Yang terjadi sebanyak 4 kasus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang yang di atas, maka dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Mappasiala* dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh?
2. Bagaimana Dampak Tradisi *Mappasiala* Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradis *Mappasiala* dalam Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ialah:
 - a. Untuk Mengetahui Tradisi *Mappasiala* dalam Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh.
 - b. Untuk Mengetahui Dampak Tradisi *Mappasiala* Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh.
 - c. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Mappasiala* Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kegunaan Penelitian ialah:

- a. Untuk menambah informasi dan khazanah intelektual bagi penulis dan pembaca dalam hukum Islam terutama dalam masalah terhadap Tradisi *Mappasiala* dalam Suku Bugis.
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh dalam bidang hukum Islam terutama masalah terhadap Tradis *Mappasiala*.
- c. Untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang maksimal layak serta valid perlu disusun rangkaian metode yang akan di jadikan landasan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*fielad research*) yang penulisan dilaksanakan di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut ada nya masalah mengenai Tradisi *Mappasiala*.

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah wali dari mempelai wanita, mempelai wanita, dan pemuka masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek Penelitian ini adalah Tradis *Mappasiala* dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh yang terjadi pada tahun 2017-2018.

3. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang. Karena populasi dalam penelitian ini sedikit maka peneliti menjadikan semua sebagai sampel dengan metode penelitian *total sampling*. Yang terdiri dari 4 orang mempelai wanita, 4 orang wali dari mempelai wanita dan 2 orang pemuka masyarakat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹² Yakni wali dari mempelai wanita, mempelai wanita dan pemuka masyarakat.

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur literatur lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian

¹² Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), cet ke-4, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara (interview) yaitu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung tentang masalah yang diteliti yakni orang tua atau wali dari kedua mempelai dan kedua mempelai.
- c. Dokumentasi yaitu sejumlah data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen.
- d. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹³

7. Metode Penulisan

- a. Deskriptif yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum

¹³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), cet. ke-2, hal. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini dibagi atas lima bab yang semuanya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I: PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis akan memberikan sejarah berdirinya Pulau Kijang, Geografis, Pendidikan, Kepegawaian di Kecamatan Reteh dan Agama.

BAB III: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN TRADISI MAPPASIALA

Bab ini memaparkan tentang Pengertian Pernikahan, Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan, Hikmah Pernikahan, Pengertian Kawin Paksa dan Dampak Kawin Paksa.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM

Terdiri dari pelaksanaan tradisi *Mappasiala* Dalam Suku Bugis Di Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Dampak Tadisi *Mappasiala* dan tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Mappasiala*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Pulau Kijang

Nama Kecamatan Reteh Berasal dari nama sebuah sungai yakni Sungai Reteh yang memiliki 2 (dua) muara. Muara pertama terletak di perbatasan Desa Sanglar dengan Desa Pulau Kecil yang sekarang sebutannya parit 20 atau Reteh Lama. Muara kedua terletak diperbatasan Kota Baru dengan Kota Sebrida. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sungai Reteh itu sendiri berasal dari kata “letih” menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya loyo, lesu, tak bertenaga capek setelah bekerja atau melakukan kegiatan berat. Selanjutnya kata letih itulah yang pada akhirnya berubah menjadi kata Reteh.¹⁴

Sebagian besar lagi mengatakan bahwa Reteh berasal dari Sereth. Seret yaitu nama sebuah kampung di wilayah kekuasaan Raja Lingga yang mana masyarakat kampung tersebut mengungsi melalui Sungai Gangsal akibat peperangan ke sebuah pemukiman di sungai yang belum diketahui namanya sehingga mereka namakan sungai tersebut asal nama kampung mereka yakni Serith yang kemudian menjadi Reteh.

Wilayah Kecamatan Reteh adalah bagian dari wilayah Kerajaan Keritang. (cikal bakal Kesultanan Indragiri). Dengan berdirinya kesultanan Indragiri yang berkedudukan di Kota Raja (Rengat). Daerah kekuasaan Kesultanan Indragiri meliputi Tembilahan, Tempuling, Sungai Luar, Anak

¹⁴ Dokumentasi, Data di Kantor Desa Pulau Kijang, 23 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serkaden Enok. Sedangkan Reteh, Igal dan Mande diserahkan oleh Kesultanan Indragiri ke Kerajaan Bintan sebagai pejabat yang menguasai wilayah tersebut. Pada tanggal 7 Januari 1883 di Istana Kota Parit Lingga dinobatkan Raja Lung dengan gelar Tengku Sulung dengan jabatan sebagai pengusaha di wilayah Reteh., Igal dan Mande, yang dilantik oleh Sultan Muhammad Syah.

Sejak tahun 1883 sampai dengan tahun 1858 Reteh berada di bawah pimpinan Raja Lung (Tengku Sulung) dengan pusat pemerintahan terletak di Kemuning. Pada tanggal 7 November 1858 Raja Lung tewas dalam perjuangan melawan Belanda dalam pertempuranya di Desa Benteng. Kerajaan Bintan kemudian dibubarkan berdasarkan Stbl. 19 jo 190 tgl. 1-3-1913. Dengan bubarnya Kerajaan Bintan, diutuslah pejabat dari Kerajaan Lingga Daek dengan jabatan Amir (sekarang Camat) ke wilayah Reteh yaitu berturut-turut dari Raja Brine, Raja Usman, Raja Rafuh, Tengku Dut, Raja Nung bin Ja'far, Raja Maksum, Raja Cik dan Raja Husen.

Selanjutnya dengan runtuhnya Kerajaan Lingga Riau, maka Amir Reteh diangkat dengan keputusan Presiden yaitu:¹⁵

- a. Raja Hasan 1916-1917
- b. Nursiwan 1917-1918
- c. Sultan Palembang 1918-1932
- d. Sidik 1932-1933

¹⁵ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mohd. Samin 1933-1935
- f. Mohd Zein 1935-1937
- g. Mohd. Sirin 1937-1939
- h. Bismarak 1939-1941

Dalam perjalanan sejarah sejak didefinisikan sampai dengan tahun 2006, terjadi pemekaran di Kecamatan Reteh hingga terbentuk beberapa kecamatan seperti Kecamatan Keritang. Kemudian Keritang mekar lagi menjadi Kecamatan Keritang dan Kecamatan Kemuning. Pada tahun 2006 Kecamatan Reteh melebur menjadi 2 (dua) Kecamatan Reteh dan Sungai Batang. Dengan demikian seluruh wilayah Kecamatan Reteh pada akhir tahun 2006 sudah terpecah menjadi 4 (empat) bagian wilayah Kecamatan. Pada tahun 2013 Desa dan Kelurahan Kecamatan Reteh terbagi menjadi 10 Desa dan 4 Kelurahan, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Reteh adalah Pulau Kijang, Madani, Metro, Pulau Kecil, Sanglar, Seberang Sanglar, Mekar Sari, Seberang Pulau Kijang, Sungai Terap, Sungai Mahang, Tanjung Labuh, Pulau Ruku, Sungai Asam dan Sungai Undan.¹⁶

Desa Pulau Kijang berdiri pada tahun 1981 tepatnya 1 Juli 1981. Sejak berdirinya Pulau Kijang sampai dengan sekarang telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Kepala Desa yang pertama kali menjabat sebagai kepala desa Pulau Kijang yaitu Ahmad Abdullah masa pada tanggal 1 Juli 1981-18 Februari 1989. Setelah masa Jabatan Ahmad Abdullah berakhir maka digantikan oleh Muhammad Thaib yang masa

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatannya dimulai dari 1 Februari 1989 - 12 Oktober 1991. Mohd Thair Thaib menjabat sebagai kepala kelurahan lebih kurang 2 tahun dan digantikan oleh Mohd Noer OE dan masa jabatannya lebih kurang yaitu 12 Oktober - 20 April 1995. Setelah masa jabatannya berakhir maka digantikan oleh A. Rasyid, AMP dan digantikan oleh Maspun Thaib setelah itu digantikan oleh Hardiansyah. Pada masa kepemimpinannya kantor tidak lagi berada di jalan Kelurahan melainkan telah dipindahkan ke jalan Sunan Gunung Jati Pulau Kijang dan sampai saat sekarang ini yang memegang jabatan sebagai Kepala Kelurahan adalah Ilhamzah.

B. Kondisi Geografis

Sedikit pemandangan Pulau Kijang dari perairan saat naik speed boat letak geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 104 10' Bujur Timur – 102 32' Bujur Timur 0 36' Lintang Utara – 10 07' Lintang Utara dengan luas wilayah mencapai 1.160,597 Hektar. Iklim di wilayah ini adalah iklim tropis basah dengan curah hujan 2,300 Milimeter.

a. Letak dan Luas Wilayah

Pulau Kijang merupakan bagian wilayah Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Jarak tempuh transportasi darat dari Kelurahan Pulau Kijang ke Ibu Kota Kabupaten 90 Kilometer, sedangkan ke Ibu Kota Provinsi 360 Kilometer jarak tempuh Kelurahan Pulau Kijang ke Provinsi 350 Kilometer, sedangkan luas wilayah Kelurahan Pulau Kijang 11.050 Kilometer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keadaan Alam

Kecamatan Reteh merupakan daerah tropis, pergantian musim hujan dan musim kemarau sangat mendukung untuk tumbuh suburnya berbagai komoditas kelapa. Palawija dan hultikultural, berkembang biaknya biota laut. Demikian pula hutan bakau sangat menjanjikan sebagai sumber pendapatan masyarakat pesisir selain ikan dan udang.

c. Iklim

Curah pada bulan September sampai dengan bulan Februari rata-rata 186 mm, membuat area sawah taddah hujan di Kecamatan Reteh cukup untuk membuat suburnya tanaman tersebut. Pergantian musim hujan ke musim kemarau lahan sawah beralih berfungsi kepada lahan kedelai, jagung dan semangka. Didaerah pesisir, pada musim Barat adalah saat yang dinantikan-nantikan oleh para nelayan diman produktifitas udang dan ikan meningkat sampai melebihi kebutuhan pasar. Sehingga hasil surplus ikan dan udang dipasarkan di Kuala Tungkal.

C. Jumlah Penduduk

Tabel I
Jumlah Penduduk Di Desa Pulau Kijang Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Precentage
1	Laki-laki	8.834	49.2%
2	Perempuan	8.837	50.8%
	Jumlah	17.671	100%

Sumber data: Kantor Desa Pulau Kijang¹⁷

Jumlah penduduk di Pulau Kijang berjumlah 17.671 jiwa. Laki-laki berjumlah 8.834 orang (49,2%), dan perempuan berjumlah 8.837 orang

¹⁷ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(50,8%). Masyarakat Pulau Kijang merupakan masyarakat yang heterogen, di mana daerah ini di huni berbagai suku bangsa. Penduduk Pulau Kijang terdiri dari berbagai suku bangsa antar lain :

Tabel II
Jumlah Penduduk Di Desa Pulau Kijang Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah	Presentase
1	Suku Bugis	5.301	35%
2	Suku Melayu	3.534	20%
3	Suku Banjar	3.004	17%
4	Suku Jawa	2.650	15%
5	Suku Minang	1.413	8%
6	Suku Batak	5.30	3%
7	China	3.50	2%

Sumber data: Kantor Dasa Pulau Kijang

Di tengah-tengah masyarakat yang heterogen tersebut tentunya berakibat pada beraneka budaya ibu yang sulit untuk dipisahkan pada setiap suku bangsa. Namun demikian, keberagaman budaya tersebut dalam wadah Pulau Kijang selalu tumbuh dan terpelihara dengan baik, selalu dihargai, serta senantiasa membaaur dalam suatu budaya baru dengan bercirikan Budaya Adat Melayu.

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian di Desa Pulau Kijang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan di Pulau Kijang tanahnya yang cukup luas yang dimanfaatkan sebagai bidang usaha pertanian yaitu padi 800 Hektar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jagung 02 Hektar, sayuran 65 Hektar. Kemudian bidang perkebunan yaitu kelapa 7.674 hektar, kopi 23 hektar. Dan bidang peternakan yaitu sapi 150 ekor dan kambing 200 ekor.

Tabel III
Perkebunan di Desa Pulau Kijang

No	Jenis Tanaman	Jumlah Lahan Produksi
1	Padi	800 Hektar
2	Sayuran	65 Hektar
3	Kelapa	7,674 Hektar
4	Kopi	23 Hektar

Sumber data : Kantor Pulau Kijang Januari tahun 2019

Tabel IV
Komposisi Mata Pencharian di Desa Pulau Kijang

No	Jenis Pekerjaan	Peresentase
1	Petani	30%
2	Perkebun	20%
3	Pegawai negri sipil	10%
4	Pension pegawai negri sipil	5%
5	Pedagang	10%
6	Nelayan	15%
7	Buruh	10%

Sumber data: Kantor Desa Pulau Kijang Januari tahun 2019

Masyarakat Pulau Kijang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani 30%, di samping itu ada juga yang bekerja di pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu Pegawai Negeri Sipil 10% pensiunan Pegawai Negeri Sipil 5%. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai Pedagang 10%, nelayan 15%, buruh 10%

E. Pendidikan

Pendidikan sebagai wahana untuk membekali manusia dengan pengetahuan sebagai modal dasar bagi pembangunan dan juga ikut mempengaruhi tingkat sosial serta perekonomian seseorang. Dalam usaha pemerintahan dan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan segala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik (mental) maka sekolah-sekolah maupun swasta yang tergambar dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel V

Klasifikasi Penduduk di Desa Pulau Kijang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1	Tidak Sekolah	10%
2	Sekolah Dasar	30%
3	Sekolah Menengah Pertama	20%
4	Sekolah Menengah Atas	40%

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Kijang Januari tahun 2019¹⁸

F. Kepegawaian

Pemerintah Kecamatan Reteh berdasarkan kurun waktu dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

¹⁸ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sejak zaman penjajahan, Reteh dibawah kekuasaan Kerajaan Keritang. Setelah berdirinya Kesultanan Indragiri Reteh diserahkan ke Kerajaan Bintan, dengan runtuhnya Kerajaan Bintan Reteh dibawah Residen.
2. Zaman penjajah, kepala pemerintahan dengan sebutan Amir dalam sejarah Kecamatan Reteh tercatat 16 Amir/Camat.
3. Zaman kemerdekaan, kepala Pemerintahan di Kecamatan Reteh dipimpin oleh seorang Camat, sampai tahun 2019

Pada akhir tahun 2019 pemerintah Kecamatan Reteh di bawah pimpinan seorang Camat, pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugasnya di Kecamatan Reteh berjumlah 434 orang. Tentara Nasional Indoesia 4 orang, Kepolisian berjumlah 20 orang. Pegawai Kontrak dan Honorer 185 orang. Rincian Pegawai yang bertugas di Kecamatan Reteh sebagaimana dimuat dalam data-data table di bawah ini.

Tabel VI

Jumlah Pegawai Kantor Yang Berada Di Kecamatan Reteh

No	Instansi	Jumlah Pegawai		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Kantor Kecamatan Reteh	10	20	12
2	Kantor Kepolisian Sektor Reteh	20	-	20
3	Kantor Komando Daerah Militer 07 Reteh	4	-	4
4	Kantor Lurah Pulau Kijang	3	2	5
5	Kantor Urusan Agama	4	1	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga	172	224	396
7	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Pertanian Peternakan	7	1	8
8	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Perhubungan	3	-	3
9	Kantor Unit Pembantu Teknis Daerah Kesehatan	14	15	29
10	Kantor Unit Pembantu Daerah Teknis Kesehatan	17	1	18
11	Kantor Unit Pembantu Daerah Teknis Dinas Pendapatan Daerah	2	1	1
12	Kantor Unit Pembantu Daerah Teknis Daerah Pribanan dan Kelautan	1	-	1
13	Kantor Pos Bea Dan Cukai	1	-	3
14	Kantor Syahbandar	3	-	3
15	Unit Pembantu Teknis BKCKB	-	3	1
16	Mantra Statistik	1	-	3
17	Kantor Perpustakaan	2	1	2
18	Petugas Pekerjaan Umum Dan Pemukiman Dan Prasarana Wilayah	2	-	5
19	Bank Rakyat Indonesia Unit Pulau	4	1	2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kijang			
20	Perseroan Terbatas Pos Indonesia	2	-	1
21	Perseroan Terbatan Persero Perusahaan Listrik Negara	6	2	8
22	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Indragiri	2	-	2
23	Kepala Desa	9	-	9
24	Perangkat Desa	82	6	87
Jumlah		371	259	630

Sumber Data: Kantor Desa Pulau Kijang

G. Agama

Agama adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak bisa dipisahkan dari diri seseorang. Masyarakat di Desa Pulau Kijang mayoritas beragama Islam dan mereka taat dalam menjalankan ibadah di dukung dengan adanya sarana penunjang bagi masyarakat dalam menjalankan agamanya. Di desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh seluruh suku Bugis menganut kepercayaan agama islam.

Tabel VII
Jumlah Suku Bugis di Desa Pulau Kijang Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	5.301	100%

Sumber data: Kantor Dasa Pulau Kijang¹⁹

¹⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN TRADSI MAPPASIALA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama adalah “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi Allah swt.²⁰ Selain itu, ada yang mengartikan pernikahan sebagai percampuran.

Adapun menurut syari’at, nikah juga dapat diartikan sebagai akad, Dalam literature *fiqh* kata nikah berasal dari bahasa arab disebut juga dengan dua istilah yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج).²¹ Di dalam al-Qura’an telah dijelaskan dalam surah an-Nissa ayat 3 ;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا ۖ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنُوثَتٌ وَرَبْعٌ فَانْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَ حِدَةً

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilama kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan* (Yogyakarta: Library Yogyakarta, 1989), cet. ke-2, hal. 9

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012), cet. ke-56, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (An-Nissa : 3)²²

Dari sudut ilmu bahasa kata perkawinan bersal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab nikah.²³ Secara bahasa kata nikah berarti “bergabung” **وطء** hubungan kelamin **وطء** dan juga berarti **عقد**.²⁴ Sedangkan nikah **اباحة الوطاء بلفظ الاتح** yakni akad atau perjanjian yang mengandung maksud mrembolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.²⁵

Ulama Hanafiyah mengartikan perkawinan sebagai aqad yang berguna untuk memiliki mutaah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa perkawinan adalah aqad dengan menggunakan laafs nikah atau *zawaj*, artinya memiliki maksudnya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya. Imam Malik menyatakan bahwa perkawinan adaklah aqad yang mengandung arti mutaah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah menyatakan perkawinan adalah aqad yang menggunakan lafas *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-

²² Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet. ke-1, hal.198

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-1, hal. 6

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-11, hal. 208 dan 828

²⁵ *Ibid*, hal.1461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²⁶

Para ahli fiqh biasa menggunakan rumusan definisi di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan lafadz عقد akad untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena dia adalah peristiwa hukum bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²⁷
- b. Penggunaan ungkapan : يتضمن اباحة الوطء yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkan secara hukum syara'diantar yang membolehkan hubungan tersebut adal adanya akad nikah diantara keduanya, dengan demikian akad itu adalah usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.
- c. Dengan menggunakan kata-kata بلفظ انكاح او تزويج yang berarti menggunakan kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antar laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata-kata *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Karena dalam awal Islam disamping akad nikah itu ada lagi

²⁶ Boedi Abdullah, Cs, *Perkawinan Keluarga Muslim*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), cet. ke-11, hal.18

²⁷ Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media: 2003), cet. ke-5, hal. 73-76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga perbudakan. Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah atau menggunakan kata *tasarri*.

Dari pengertian di atas pernikahan mengandung aspek hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan pelaksanaan syariat agama, maka didalamnya terdapat maksud dan tujuan yaitu mengharapkan keridhoan Allah swt.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan adalah janji yang diucapkan dan diberi tanda kemudian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang siap menjadi suami istri, perjanjian dengan akad yang disaksikan oleh beberapa orang dan diberi izin oleh wali perempuan.

Anwar Harjono mengatakan pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.²⁹ Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.³⁰

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

²⁸ Abdul Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet. ke-8, hal.8

²⁹ R. Abdul Djamil, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), cet. ke-2, hal. 47.

³⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2004), cet. ke-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.³¹

Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan sebagai perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³²

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan dan takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan melangsungkan pernikahan. Pernikahan sangat dianjurkan khususnya bagi orang-orang yang sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan mempunyai persiapan dan jiwa yang sehat untuk melaksanakan pernikahan.

Ulama Maliki Syafi'i dan Hanbal berpendapat bahwa orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Adapun menurut Imam Hanafi dalam keadaan apapun nikah adalah *mustahab*.

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan bisa dikatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Rukun yaitu sesuatu yang pasti ada yang menentukan sah dan

³¹ Soedharyo Soimin, *op cit*, hal. 23

³² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), cet. ke-2, hal. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu.³³

Undang-undang pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.³⁴ Maka bagi umat islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik tetap mempunyai kedudukan yang sangat menentukan untuk sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan.

a. Syarat-syarat pernikahan

Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab dan qabul.

1. Calon mempelai pria
 - a) Beragama islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawina
2. Calon mempelai wanita
 - a) Beragama islam
 - b) Wanita Jelas orangnya
 - c) Dapat dimintai persetujuan
 - d) Tidak terdapat halangan.

³³ Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, hal. 11 Lihat juga: Ibu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, jil. 2 terj, hal. 394-395

³⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, (Bandung: Sinar Baru, 1981), cet. ke-45, hal. 374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antar keduanya harus ada persetujuan bebas, yaitu persetujuan yang dilahirkan dalam keadaan sehat dan bukan karena paksaan. Disyaratkan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai adalah pertimbangan yang logis karena dengan tidak adanya persetujuan bebas ini mengindikasikan bahwa salah satu pihak atau keduanya tidak memiliki hasrat untuk membentuk kehidupan keluarga sebagai salah satu tujuan perkawinan.³⁵

Adapun syarat wali dalam kitab Fiqh as-Syafi'i (terjemahan attandzhib) karya Dr. Mustofa Diibul Bigha adalah sebagai berikut.

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Mempunyai akal atau tidak gila
- d. Merdeka
- e. Laki-laki
- f. Adil.
- g. Harus ada pengucapan ijab dan qabul.³⁶

Yang dimaksud dengan ijab dan qabul adalah pengukuhan janji perkawinan sebagai satu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah dan diucapkan dengan jelas, meyakinkan dan tidak meragukan. Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang muda dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan

³⁵ Syayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UU Press, 1974), Cet Ke-2, hal.

³⁶ Mustofa Dibbul Bigha, *Fiqh As-Syafi'I*, (Surabaya: CV. Bintang Pelajar, 1984), cet.ke-hal. 367

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad perkawinan sebagai pernyataan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak.

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari kedua mempelai
- c. Memaknai kata-kata menikah *tazwij* atau terjemahan dari kata tersebut
- d. Antar ijab dan qabul jelas maksudnya
- e. Orang-orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram umroh
- f. Majelis ijab qabul dihadiri minimal 4 orang.³⁷

Selain beberapa syarat di atas, hukum pernikahan Islam di Indonesia memberikan salah satu syarat dalam perkawinan yakni adanya persetujuan calon mempelai yang akan menjadi pasangan suami istri sehingga mereka nantinya menjadi mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri yang sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 16 ayat (2) dikatakan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.³⁸

³⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, hal. 63

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1990), cet. k-3, hal. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rukun-Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sahnya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Dalam pernikahan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:³⁹

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak mempelai wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighad aqad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam,

yaitu:

1. Wali dari pihak perempuan
2. Mahar atau mas kawin
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah

Imam as-Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam

yaitu:

³⁹ *Ibid*, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafi, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki.

Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:

- a. Sighat (ijab dan qabul)
- b. Calon pengantin laki-laki
- c. Calon pengantin perempuan
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan

1. Calon suami dan calon istri

Syari'at menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi calon suami berdasarkan ijtihad.

- a. Calon beragama islam
- b. Terang (jelas) bahwa calon suami betul laki-laki
- c. Orangny diketahui
- d. Calon laki-laki jelas halal kawin oleh calon istri
- e. Calon laki-laki tahu calon istri halal untuk dinikahi
- f. Calon suami rela (tidak dipaksa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tidak sedang dalam ihram
 - h. Tidak punya istri empat
 2. Syarat-syarat calon istri yaitu
 - a. Islam (ahli kitab)
 - b. Jelas bahwa dia wanita bukan *khunsa* (banci)
 - c. Halal bagi calon suami
 - d. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
 - e. Tidak dipaksa atau ihtiyar
 - f. Tidak dalam keadaan ihram haji.
 3. Sighat akad nikah (ijab dan qabul)

Dalam melaksanakan ijab dan qabul harus digunakan kata-kata yang dapat mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul, ijab adalah penyerahan dari pihak pertama sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Adapun syarat akad nikah adalah:⁴⁰

- a. Aqad harus dimulai dari ijab dan dilangsungkan dengan qabul
- b. Materi ijab dan qabul tidak boleh berbeda.
- c. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus

⁴⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2004), cet. ke-35 hal.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan.
- e. Ijab dan qabul harus menggunakan kata-kata yang jelas dan terang tidak boleh menggunakan kata-kata sindiran.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak boleh berselang waktu (pasal 27).
2. Akad nikah dilakukan secara sendir secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan dengan orang lain.

Pasal 28

3. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.

Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Dalam hal ini mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan.

4. Mahar (mas kawin)

Mahar adalah pemberian wajib atas suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami atau suatu pemberian yang

⁴¹ Abdull Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), cet. ke-5, hal. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan bagi calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda atau jasa⁴². Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Hal ini didasari oleh firman Allah SWT. Qs. Annisa:4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

4. Wali

Wali secara etimologi berarti penguasa atau pelindung. Menurut istilah fiqh, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai atau melindungi orang atau baran. Sedangkan orang yang diberikan kekuasaan perwalian disebut wali.

Para ulama berbeda pendapat dalam memposisikan wali dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, wali merupakan syarat sahnya perkawinan.
- b. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi dan Az-zuhiri berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali sedang calon suaminya sebanding (sekufu) maka pernikahannya boleh.

⁴² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet ke-7, 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sedangkan Abu Daud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada janda.⁴³

Para jumhur ulama sepakat bahwa syarat menjadi wali itu adalah:

- Telah dan dewasa berakal sehat dalam arti anak kecil tidak berhak menjadi wali.
- Laki-laki tidak boleh perempuan menjadi wali.
- Muslim.

Hal ini berkenaan dengan firman Allah swt. Surat al-Imran : 28

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)”⁴⁴

- Merdeka
- Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*
- Berfikir baik
- Adil dalam arti tidak pernah terlibat dosa besar atau tidak sering terlibat dosa kecil
- Tidak sedang melakukan ihram

⁴³ Slamet Abidin, dkk, *op. cit.*

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet.t ke-1, hal. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Nabi saw. Dari Usman Riwayat Muslim mengatakan

عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

Artinya: “Dari Usman r.a. dari nabi saw, beliau bersabda : “orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak pula boleh meminang”. (H.R Muslim).”

Sebagaimana rukun-rukun perkawinan diataranya adanya wali dalam perkawinan sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri.

Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.”

Lantas wali dalam perikahan terbagi menjadi empat macam yakni:

- a. Wali Nasab, adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan menikah.
 - Ayah
 - Kakek
 - Saudara laki-laki seayah seibu
 - Saudara laki-laki seayah saja
 - Anak laki-laki saudara seayah seibu
 - Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
 - Anak laki-laki no. 7
 - Anak laki-laki no. 8 dst.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qodi

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Yang diberikan hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

- c. Wali Maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- d. Wali Mujbir yaitu wali yang memiliki wewenang langsung untuk menikahkan yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapat izin dari orang tersebut.⁴⁵ Menurut madzhab Syafi'i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Sedangkan menurut madzhab Hanafi, wali mujbir adalah berlaku bagi 'ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalnya.

الحنفية قالوا : لا ولي إلا مجبر فمعن الولاية تنفيذ القول على الغير سواء رضي او لم يرض فليس عندهم ولي غير مجبر يتوقف عليه العقد. ويتخص الولي المجبر با جبار الصغير والغيرة متعلق والمجنونة الكبار

Artinya: "Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali wali mujbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan pendapat atas orang lain baik dia rela maupun tidak, maka tidak ada wali bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada akadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak kecil perempuan secara mutlak, laki-laki perempuan yang majnun (gila) sekalipun mereka telah dewasa."⁴⁶

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: UII Press.2011), cet ke-4, hal. 40

⁴⁶ Abdurahamman al-Jaziri, *al-Fiqh 'al-Madzhib al-'arba'ah*, (Yogyakarta: Pt. Noura, 2001), cet. ke-4, hal. 720

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut madzhab Syafi'i wali *mujbir* adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Atau wali *mujbir* adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil ataupun telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Dalam hal ini wali yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah, dan kakek ketika ayah tidak ada⁴⁷.

5. Saksi

Akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi menyaksikan akad nikah tersebut, jumhur ulama sepakat saksi adalah rukun nikah.

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya: "Dari Abu Musa al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali".

Dalam Al-qur'an dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282.

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)."⁴⁸

Beberapa syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah:

1. Islam
2. Berakal, orang gila tidak sah
3. Baligh

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *op. cit*, hal. 400

⁴⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet. ke-1, hal. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Merdeka
5. Keduanya mendengar ucapan ijab dan Kabul dari kedua belah pihak.

3. Hukum Nikah

Pada dasarnya golongan *fuqaha* yakni jumhur berpendapat bahwa menikah bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama Maliki Mutakhirin berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian lainya dan mubah bagi golongan lainya. Hal itu ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.

Bagi *fuqaha* yang berpendapat nikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian yang lain serta mubah bagi sebagian yang lain, dan berdasarkan pertimbangan kemashlahatan. *Qiyas* semacam inilah yang disebut *qiyas mursal* yaitu suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Dalam hal ini *qiyas* semacam ini kebanyakan ulama mengingkari tetapi nampak jelas dipegangi mazhab Maliki.

Maka dapat dikatakan bahwa hukum nikah itu bisa berubah-ubah sesuai keadaan pelakunya seperti berikut :

1. Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang baik adalah menikah.

2. Sunnah

Bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina maka hukum menikah baginya sunnah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mampu menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir kepada istrinya.

4. Makruh

Makruh hukumnya menikah bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikannya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

5. Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah hukumnya mubah.⁴⁹

Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*, (Depok : Qultum Media, 2000), cet ke-1, hal 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, di antaranya sesuai yang tercantum pada Bab II KHI tentang dasar-dasar pernikahan pasal (3) disebutkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah adalah mampu menyelesaikan segala persoalan yang muncul dengan cara yang baik, sehingga tercipta suatu ketenangan. Mawwadah menurut Ibrahim bin Umar al-Baihaqy seorang ahli tafsir mawwaddah adalah cinta, hati yang mawwaddah tidak akan memutuskan jalan kasih sayang.

Rahmah menurut Quraisy Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-qura’an” memaknainya sebuah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidak berdayaan. Suami istri akan bersungguh sungguh melakukan pemberdayaan serta mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya, serta mendorong seseorang yang bersangkutan untuk memepedayakannya.⁵⁰

1. Untuk mendapatkan anak dan keturunan yang untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surah An-Nissa ayat 1 (satu).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً^{٥١}

⁵⁰ Khudzaifah al-Jurjani, *Pernikahan Terlaknat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai Allah*, (Jombang: Lintas Media), cet. ke-4, hal. 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*”⁵¹

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”⁵²

3. Untuk menyalurkan syahwat dan penumpukan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab.

Manusia diciptakan Allah swt. berjodoh-jodoh dan mempunyai keinginan untuk berhubungan badan antara pria dan wanita sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Imran ayat 14 :

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya: “*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*”

⁵¹ Kementrian Agama RI, *al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Syamsil al-Quran, 2012), cet. ke-1, hal. 558

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2006), cet ke-6, hal. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵³

B. Kawin Paksa

1. Pengertian Kawin Paksa

Pernikahan yang dipaksa atau dikenal dengan kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata yakni “kawin” dan “paksa”. Kawin paksa menurut hukum islam istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara implisit. Namun, dalam perwalian, salah satu disebutkan tentang *ijbar* dan wali *mujbir*, pemahaman terhadap istilah yang kemudian muncul pemahaman tentang kawin paksa, di mana hak *ijbar* ini dipahami sebagai hak memaksakan sesuatu pernikahan oleh orang lain dalam hal tersebut adalah ayahnya.⁵⁴

Adapun pengertian *ijbar* sendiri adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab.

Dalam fiqh Syafi’i dinyatakan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah dan kalau tidak ada ayah maka kakek yang berhak jadi apabila seseorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk

⁵³ Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS. 2001), cet. ke-2, hal.8

⁵⁴ Hosein Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003), cet. ke-3, hal. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan anak perempuannya meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.⁵⁵

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perwalian paksa (wali *mujbir*) ditetapkan bagi ‘ashabah nasabiyah atas anak kecil, orang gila, dan orang bodoh. Sementara para ulama selain madzhab Hanafi membedakan anak kecil dengan orang-orang gila dan orang-orang bodoh. Mereka sepakat atas ditetapkannya perwalian paksa terhadap orang gila, orang bodoh yaitu bagi ayah, kakek, pelaksanaan wasiat, dan penguasa. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa perwalian ini ditetapkan bagi ayah dan pelaksanaan wasiat.⁵⁶

Menurut Sayid Sabiq perwalian *paksa* berlaku kepada orang yang kehilangan kapabilitas, seperti orang gila dan anak kecil yang tidak mumayiz, sebagaimana hal itu juga berlaku kepada orang yang kapabilitasnya tidak sempurna, seperti anak kecil yang mumayyiz dan orang bodoh yang mumayiz, makna berlakunya perwalian *paksa* bagi mereka adalah bahwa wali boleh melakukan akad pernikahan bagi mereka tanpa harus minta pendapatnya. Akadnya sah tanpa bergantung kepada ridho dari mereka.⁵⁷

Kemudian mengenai wanita yang masih perawan yang telah baligh menikahkannya disertai dengan unsur-unsur paksaan untuk menikah bertentangan dengan dasar-dasar agama dan akal pikiran. Allah tidak membolehkan wali untuk memaksanya. Lantas bagaimana boleh seorang

⁵⁵ Hosein Ibrahim, *op.cit.*

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta, Republika Penerbit, 2017), cet. ke-4, hal. 387

⁵⁷ *Ibid*, hal. 399

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wali memaksanya untuk menikah laki-laki yang tidak ia sukai, dan mengagauli laki-laki yang tidak dia sukai Allah tidak menjadikan cinta dan kasih sayang anantara suami istri jika pernikahan itu tidak terjadi kecuali disertai dengan kebencian dan keengganan istri terhadap suaminya, maka cinta seperti apa yang ada didalam pernikahan tersebut?. Maka kiranya diperhatikan salah saktu faedah pernikahan itu adalah untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita.

Ulama-ulama membolehkan wali bapak dan kakek menikahkan dengan tidak izin ini, menggantungkan bolehnya dengan syarat sebagai berikut.

- a. Tidak ada permusuhan antara gadis dan ayah atau antara gadis dengan calon suaminya.
- b. Hendaklah dikawinkan dengan Calon suami adalah sekufu
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar mitsil
- d. Tidak dikawinkan dengan orang yang tidak mampu membayar mahar
- e. Tidak dikawinkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayaka).⁵⁸

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan sumber Hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, menganut prinsip atas dasar kesukarelaan dalam perkawinan, sebagaimana yang telah dianut Hukum Islam itu sendiri mengenai kesukarelaan dalam perkawinan.

⁵⁸Miftahul Huda, *Kawin Paksa*, (Yogyakarta, Ponorogo Press, 2009), cet. ke-2, hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.

Perlu diketahui bahwa Pernikahan dalam hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya adanya kerelaan calon isteri. Wajib bagi wali untuk bertanya terlebih dahulu kepada calon istri, dan mengetahui kerelaannya sebelum diaqad pernikahan. Hal ini karena pernikahan adalah pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, karena Islam melarang kita menikahkan dengan paksa, baik gadis maupun janda. Karena Islam tidak juga menganjurkan pernikahan yang diniati untuk menyakiti, karena pernikahan yang dilakukan lantaran paksaan hanya dapat menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam.

Dari Ibnu Abbas *radiallahu anhum* bahwasannya Nabi saw. bersabda.

الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها

Artinya: “Janda lebih berhak atas dirinya sedang perawan diminta ijinnya

dan diamnya seorang perawan itu tanda persetujuan.”⁵⁹

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis yang sesuai dengan syariat islam hendaknya ketika ingin melangsung.

⁵⁹ al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana’ani, *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar al-kotob al-iilmiyah, 2006), cet ke-1, hal. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun ada pendapat yang membolehkan adanya ijbar, namun prinsip “kemerdekaan” yang digaris bawahi oleh umat Islam termasuk juga dalam hal memilih pasangan, haruslah diperhatikan pula pada zaman Rasul juga pernah terjadi seorang gadis datang mengadu kepada Aisyah r.a perihal ayahnya memaksanya kawin dengan seorang laki-laki yang tidak ia sukai. Setelah disampaikan kepada Rasul, beliau mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi. Dan akhirnya ia menerima laki-laki pilihan orang tuanya,⁶⁰ dengan berkata:

....وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنَّ لَيْسَ لِلْأَبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: “*Hanya saja aku ingin para wanita tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti ini.*”

Dalam Fiqih Sunnah juga dijelaskan bahwa para ulama mazhab telah sepakat seorang ayah atau wali haruslah meminta izin terlebih dahulu pendapat calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum melangsungkan akad perkawinan karena persetujuan kedua belah pihak adalah syarat utama yang menentukan sahnyanya perkawinannya.⁶¹

Kesepakatan ulama ini berdasarkan hadist Rasulullah saw. Yang telah disebutkan diatas.

⁶⁰ Muhammad Ihsan Armia, *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gender*, Jurnal, Vol, 5, No,2, 2014, (Malang, Uin Malang), hal. 96.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *op. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَلَا تَنْكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْأَلَ

Artinya: “Ubaidullah bin Umar bin Maisarah al-Qawaririy telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin al-Harits telah memtahukan kepada kami Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah telah memberitahu kepada kami, bahwa Rasulullah saw bersabda, “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pertimbangan dan seorang gadis perawan tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai persetujuan. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasul, bagaimana tanda ia setuju?”. Beliau menjawab, “Bila ia diam.”

2. Dampak Kawin Paksa

sendiri memiliki akibat yang dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Berikut penulis jabarkan beberapa akibat dari kawin paksa :

a. Tidak dapat terwujud keluarga yang sakinah mawwadah dan warrahmah.

Salah satu tujuan dalam pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawwadah dan warrahmah. Memaksa seseorang untuk melangsungkan pernikahan dengan orang yang tidak disukai dan dicintai merupakan awal rumah tangga yang tidak baik. Hal ini karena cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu penting dalam membangun rumah tangga.⁶²

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 1 di jelaskan sebagai berikut:

⁶² Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), cet. 2, hal. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahan didasari atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan.
3. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupann rumah tangga untuk menjapai tujuan pernikahan maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban masing-masing.⁶³ Dalam prkawinan hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami. Oleh sebab itu keduanya harus saling mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu harus dipahami bahwa Islam telah memberikan kepada suami hak untuk memimpin dalam rumah tangga dan harus mentaatinya.⁶⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 no. 2 menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri yakni, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”⁶⁵ Oleh sebab itu, jika pasangan suami istri

⁶³ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1974), cet. ke-7, hal. 126

⁶⁴ Muhammad ash- Shabbag, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Mantiq, 1993), cet ke-3, hal. 155

⁶⁵ Imam al-ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), cet. ke-1, hal.112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah karena paksaan keduanya sulit untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing karena keterpaksaan tersebut hanya dapat memicu terjadinya keributan yang membuat terjadinya perceraian.

b. Dampak Kekerasan

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat kepada orang yang berposisi lemah baik secara fisik maupun non fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan.⁶⁶

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi dalam rumah tangga.⁶⁷

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan kekerasan dalam bentuk penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan maupun berat.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan symbol dan sikap mengarah kepada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya.

3. Kekerasan Psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata.

⁶⁶Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2004), cet. ke-2 hal. 267

⁶⁷ *Ibid*, 269

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Tidak dapat menjalankan perintah Allah swt. Dan Rasul saw. sesuai dengan syariat Islam.

Dengan adanya pernikahan yang didasari atas keterpaksaan dikawatirkan ibadah dari pernikahan itu tidak ada. Dalam islamada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya adalah ikatan yang timbul dari rasa ikhlas ridha antara manusia dan pernikahan termasuk didalamnya.⁶⁸

UIN SUSKA RIAU

⁶⁸ <http://www.organisasi.org.efek-dampakburukperjodohankawinpaksasapertinurbaya//>
akses pada 20 Mei 2019 Pukul 15.30 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappasiala* adalah tradisi di mana kedua keluarga mempersatukan antara 2 insan yakni antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan perkawinan namun kebanyakan dari orang tua yang mempersatukan kedua mempelai itu tanpa persetujuan wanita atau bisa dikatakan memaksa karena pihak orang tua hanya memberi tahu kalau wanita akan dinikahkan oleh calon laki-laki yang telah dipilihkan oleh orang tuanya dan kebanyakan dari kedua mempelai tidak saling kenal. Biasanya persetujuan dari wanita tidak akan merubah persepsi orang tua untuk menikahkan anaknya tersebut. Didalam kehidupan masyarakat Pulau Kijang Kecamatan Reteh Tradisi *Mappasiala* atau nikah paksa lazim sekali terjadi terkhusus bagi wanita-wanitanya, Tradisi *Mappasiala* atau nikah paksa ini dinilai wajar-wajar saja bagi masyarakat Pulau Kijang Kecamatan Reteh, biasanya Tradisi *Mappasiala* ini terjadi karena faktor ekonomi, faktor keturunan calon mempelai laki-laki apabila menurut keluarga keturunan mereka berada ataupun bisa dikatakan keturunan terpandang maka besar kemungkinan Tradis *Mappasiala* atau nikah paksa akan berlangsung.
2. Dampak Tradisi *Mappasiala*, didalam konteks ini ada dua dampak positif yakni positif dan negatif, namun Tradisi *Mappasiala* memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dampak negatif dari pada dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu *Mappasiala* terjadi itu karena anantara masing-masing keluarga telah mengenal sehingga masing-masing keluarga sudah banyak mengetahui kehidupan 2 keluarga dan karakter keluarga, Mempermudah dalam menyelesaikan masalah jikalau ada masalah dalam keluarga tersebut, mempermudah mempersiapkan kebutuhan acara pernikahan tersebut karena sudah saling kenal. Dan dampak negatifnya yaitu, Tidak ada rasa kasih sayang dan cinta antara kedua mempelai, sesungguhnya dalam membina rumah tangga, kurangnya Rasa tanggung jawab, sering keluarga ikut campur dalam rumah tangga mereka, dan Jikalau sering terjadi pertengkaran maka tak jarang jika rumah tanga mereka berkahir pada perceraian.

3. Tradis *Mappasiala* atau nikah paksa menurut hukum islam yakni didalam hukum islam apabila orang tua ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya hendaknya meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anak tersebut. Tetapi sah-sah saja apabila yang menjadi wali pada pernikahan tersebut yakni wali *mujbir*, wali *mujbir* adalah wali yang boleh memaksa anaknya menikah dengan pilihannya. Tapi alangkah baiknya apabila orang tua meminta persetujuan terlebih dahulu kepada mempelai dan mengetahui jawaban yang sebenarnya dari mepelai wanita. Agar terhindar dari dampak-dampak yang negatif dari Trdisi *Mappasiala*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran-Saran

Adapun saran penulis adalah:

1. Hendaknya dalam sebelum terjadinya pernikahan itu orang tua meminta izin terlebih dahulu dan meminta persetujuan kepada anaknya, jangan kita sebagai orang tua mementingkan ego sendiri, karena sesuatu yang dipaksa itu tidak akan mungkin berjalan dengan baik, hendaknya melakukan musyawarah dengan cara mengumpulkan keluarga dekat dan jauh serta anak yang bersangkutan diajak berdiskusi mengenai pernikahan pernikahan tersebut, semua itu agar tidak berakhir kepada hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Sebagai pihak wanita yang dipaksa, hendaknya berani menegaskan jawaban jangan karena takut, pernikahan yang dilandasi atas paksaan tersebut diterima-terima saja.
3. Hendak pihak KUA setempat memastikan apakah pernikahan tersebut dilandasi atas paksaan, apabila pernikahan tersebut dilandasi atas paksaan sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam pernikahan memberikan arahan atau nasehat terlebih dahulu, atau mencegah pernikahan tersebut.
4. Kita sebagai mahasiswa Hukum Keluarga hendaknya kita aktif dalam permasalahan seperti ini, karena ini kewajiban kita sebagai mahasiswa yang paham akan hal perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ansori, Abdul Ghofur. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press. 2011. cet. ke-4
- Azhar, Ahmad. *hukum perkawinan islam*. Yogyakarta. uii press. 2007, cet. ke-1
- Amiril-yamani As-shana'ani, Al-imam Muhammad bin Ismail. *Subulussalam Syarah Bulughul Maram*. Beirut: Dar Al-kotob Al-iilmiyah. 2006. cet. ke-1
- Azni. *Ilmu fiqh dan Hukum Heluarga*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006. cet. ke-3
- Abdullah, Boedi Cs. *Perkawinan Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia. 2013. cet. ke-11
- Alghazali, Imam. *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1993. cet. ke-1
- Abdullah, Abdul Gani, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung. Fokus Media. 2005, cet. ke-5
- Abdurahamman al-Jaziri. *al-Fiqh 'al Madzhib al-'arba'ah*, Semarang, Pustaka al Kautsar, 2008. cet. ke-7
- Al-Jurjani, Khudzaifah. *Pernikahan Terlaknat Berbagai Pernikahan yang Dimurkai Allah*. Jombang: Lintas Media, 2001. cet. ke- 4
- Ash- Shabbag, Muhammad. *Keluarga Bahagia Dalam Islam*. Yogyakarta: CV. Pustaka Manatiq. 1993. cet. ke-3
- Azzam. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Amzah. 2009. cet. ke-7
- Az-Zuhaili Wabbah. *Fiqh Islam Wadillatuhu*. Jakarta. Gema Insani. 2011. cet. ke-10
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika. cet. ke- 2
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik. 2013. cet. ke-4
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1990. cet. ke-3
- Sh Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*, Jakarta: Pustaka al- Kautsar. 2004. cet. ke-2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dibbul Bigha, Mustofa. *Fiqh As-Syafi'I*. Surabaya: CV. Bintang Pelajar. 1984. cet. ke-7
- Djamil, R. Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju. 2000. cet. ke-2
- Dkk, Slamet Abidin. *Fiqh Munakhat1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999. cet. k-3
- Faridl, Mitahul. *Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999. cet. ke-2
- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-lu'lu' wal Marjan*, Semarang: al- Ridha. 2012, cet. ke-3
- Ghozali, Abdul Rahman. *fiqh munakahat*. Jakarta. Kencana. 2005. cet. ke-8
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000. cet. Ke-7
- Saifuddin, *Membangun Keluarga Sakinah Tanya Jawab Seputar Masalah Keluarga dan Solusinya*. Depok : Qultum Media. 2000. cet. ke-1
- Huda, Miftahul. *Kawin Paksa*. Yogyakarta. Ponorogo Press Abdul aziz. 2009. cet. ke- 2
- Ibrahim, Hosein. *Fiqh perbandingan masalah pernikahan*. Jakarta pustaka firdaus. 2003. cet. ke-3
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid. analisis fiqh para mujtahid*. terj. jil. 2 Jakarta: Puataka Aamani. cet. ke- 2
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Syamsil al-Quran, 2012. cet. ke-1
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif. 1997. cet. ke-11
- Muhammad, Husain. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : LKIS. 2001. cet. ke-2
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974. cet. ke-7
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. RakeSarasini. 1991. cet. ke-2
- Nasution, Khoruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Studi Sejarah. Metode. Pembaruan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan Muslim. Yogyakarta. Aedemia. Yogyakarta: Aedemia, 2009. cet. ke-2

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. cet. ke-1

Tjitrosudiro, R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burglijk Wetboek. Bab I UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999. cet. ke-3

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2012, cet. ke-56

Syariffudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta. Prenada Media. 2003. cet. ke-5

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpretama Offset. 2006. cet. ke- 6

Sabiq. Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pendi. 2006. cet. ke- 4

Seri perundang-undang.undang-undang perkawinan.undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI, Yogyakarta: pustaka yustisia. 2009, cet. ke-2

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafik. 2004. cet. ke-4

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan* Yogyakarta: Library Yogyakarta. 1989. cet. ke-2

Sahrani, Sohari. Dan Tihani. *kajian Fiqh nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. cet. ke-1

Larigan, Azhari Akmal. Nuruddin Amir. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006. cet. ke-1

Ambo' Tang, Pemuka Masyarakat, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 25 Februari 2019 jam 14.00 Wib.

Yunus, Pemuka Masyarakat, *wawancara* , Pulau Kijang 25 Februari 2019 jam 20.00 Wib

Hasna, Mempelai Wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 26 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Aris, Orang Tua Mempelai Wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 26 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib.



Murni, mempelai wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 12 November 2018 pukul 09:00 Wib.

Basri, Orang Tua Mempelai Wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 28 Februari 2019 Pukul 09:00 Wib.

Rina, mempelai wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 2 Februari 2019 pukul 16:00 Wib.

Ayu Angguna, mempelai wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 2 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib

Asmar, Orang Tua Mempelai Wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 2 Februari 2019 pukul 17:00 Wib.

H. Baco', orang tua mempelai wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 2 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Ayu Angguna, mempelai wanita, *wawancara*, Pulau Kijang tanggal 2 Februari 2019 Pukul 09.00 Wib.

Ihsan, Armia Muhammad. *Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Gander*. Jurnal. Vol. 5. No.2. 2015

<https://almanhaj.or.id/2658-betapa-penting-menyambung-silaturahmi.html>

<http://www.organisasi.org.efekdampakburukperjodohankawinpaksasepertinurbaya/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NASIRMAN**

NIM : **11521101394**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA (AH)**

Judul : **TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM.**

Pembimbing : **Dr. Wahidin, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Oktober 2019

↳ Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL
NIP. 1988 0430 2019031010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM*, yang ditulis oleh :

Nama : **NASIRMAN**
 NIM : 11521101394
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)
 Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin 30 September 2019
 Waktu : 13.30 Wib
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Oktober 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Munir, Lc., MA

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. Arisman, M.Sy

Mengetahui :
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Erni, S.Sos., MM
 NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

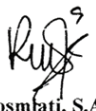
Proposal dengan judul *TRADISI MAPPASIALA* DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU
KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM ditulis oleh saudara :


Nama : Nasirman
NIM : 11521101394
Program Studi : Hukum Keluarga
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Jum'at 14 Desember 2018
Narasumber : Hendri Sayuti, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 22 Desember 2018
Narasumber


Rosmhati, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003


Hendri Sayuti, M.Ag
NIP. 197608292003121003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6306/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NASIRMAN
N I M : 11521101394
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 3 JULI 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 5 Agustus 2019



Dekan,
Dr. H. Hajar, M.Ag
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16944
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/62/2019 Tanggal 2 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

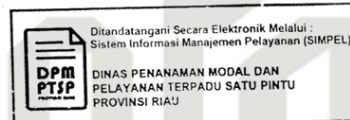
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : NASIRMAN |
| 2. NIM / KTP | : 11521101394 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG
KECAMATAN RETEH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Januari 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/25

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/16944 Tanggal 3 Januari 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **NASIRMAN**
NIM : 11521101394
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga /S1
Alamat : Jl. K. Ali Haji Kec. Reteh
Judul Penelitian : **TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH**
Lokasi Penelitian : **DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari s/d 21 April 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 21 Januari 2019

a.n **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
Kabid Politik dan Kemasyarakatan,



HARYONO KARIM
Pembina

NIP. 19750421 199403 1 003

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH**

Jalan Penunjang Telp. 0768 – 329541
PULAU KIJANG – 29273

REKOMENDASI

NOMOR : 02 /REK-RTH/TV/2019

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY) UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Nomor: 070/BKBP-POLMAS/2019/25 tanggal 3 Januari 2019, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : NASIRMAN
NIM : 11521101394
Pangkat Studi/Jenjang : Hukum Keluarga (S1)
Alamat : Jl. K. Ali Haji Kec. Reteh
Judul Penelitian : TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS
DI DESA PULAU KIJANG
KECAMATAN RETEH
Lokasi Penelitian : DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai Tanggal 21 Januari s/d 21 April 2019.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 22 April 2019

CAMAT RETEH
SEKRETARIS KECAMATAN

ARBANI, S. Pd. SD
Pembina (IV/a)
NIP. 19630405 198410 1 001

Tembusan :

1. Sdr. Dekan Fakultas dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
2. Sdr. Lurah Pulau Kijang
3. Yang bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
KELURAHAN PULAU KIJANG**

Jl. Sunan Gunung Jati No. 01 Telp. 0768-329017

REKOMENDASI

Nomor : 2 z/REK-PK/IV/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY) UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Lurah Pulau Kijang kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, setelah membaca surat Rekomendasi dari Camat Reteh Nomor: 02/REK-RTH/IV/2019 tanggal 22 April 2019, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **NASIRMAN**
NIM : **11521101394**
Pangkat Studi/Jenjang : **Hukum Keluarga SI**
Alamat : **Jl. K. Haji Kecamatan Reteh**
Judul Penelitian : **TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KEC. RETEH**
Lokasi Penelitian : **KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungan Penelitian dan Pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 21 Januari s/d 21 April 2019.

Demikianlah Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran dan Pengumpulan data ini dan terima kasih.

Pulau Kijang, 22 April 2019
An. Pih LURAH PULAU KIJANG
KELURAHAN PULAU KIJANG
HASNUR RASIDI, S. Kep
NIP. 19820616 201102 1 001

Tambusan :

1. Sdr. Lurah Pulau Kijang
2. Sdr. Dekan Fakultas dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru
3. Yang bersangkutan.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN RETEH
KELURAHAN PULAU KIJANG
Jl.Sunan Gunung Jati NO. 01 Telp. 0768329017**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 038 /REK-FK/VIII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini kelurahan pulau kijang kecamatan reteh kabupaten indragiri hilir menerangkan:

Nama : Nasirman
NIM : 11521101394
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenjang : S1
Peguruan Tinggi : UIN SUSKA RIAU
Judul Penelitian : TRADISI MAPPASIALA DALAM SUKU BUGIS DI DESA PULAU KIJANG KECAMATAN RETEH MENURUT HUKUM ISLAM

Bahwa nama tersebut benar-benar telah selesai melakukan kegiatan penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Pulau Kijang Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada pihak yang bersangkutan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau Kijang, 15 Agustus 2019

Lurah Pulau Kijang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP

NASIRMAN, lahir di Kabupaten INDRAGIRI HILIR tepatnya di Kecamatan Reteh Desa Pulau Kijang pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 1997. Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Firdaus dan Multazam.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di bangku Taman Kanak- Kanak (TK) di DDI Pulau Kijang pada tahun 2002, kemudian melanjutkan MI (Madrasah Ibtidaiyah) di DDI Pulau Kijang dan selesai pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTS (Madrasah Tsanawiyah) di DDI Pulau Kijang selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Pondok Pesantren atau MA (Madrshah Aliyah) di Darul Istiqamah Selensen dan selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah kenjaanjang S1 tepat nya di Universitas Sultan Syarif Qasim Riau pada Fakultas Syariah dan Hukum di Jurusan Hukum Keluarga. Dan telah melakukan siding Munaqasah dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 September 2019.

UIN SUSKA RIAU